

# Pembangunan Berbasis Produktivitas Unggulan Daerah

Ade M. Yuardani<sup>1</sup> dan Oscar Rynandi Andjioe<sup>+2</sup>

Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak, Jalan Ahmad Yani Pontianak<sup>1</sup>,  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak, Jalan Ahmad Yani Pontianak<sup>+2</sup>,  
Alamat koresponden, email: oscarpolnep@yahoo.com<sup>+</sup>

*Abstract* - Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu, terkait dengan pembangunan sector perikanan yang ada di Selimbau, dengan informan kuncinya sebanyak 3 orang. Metode dan teknik analisa data menggunakan Analisis deskriptif kualitatif.

*Keywords:* pembangunan, kebijakan pembinaan unggulan daerah.

## I. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan kata kunci bagi kemajuan suatu daerah. Maju mundurnya suatu daerah dapat terlihat dengan banyaknya perubahan yang di akibatkan oleh pembangunan yang di lakukan baik oleh pemerintah maupun daerah. Kemajuan suatu daerah tidak hanya di tentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya, akan tetapi pembangunan akan berhasil apabila di dukung oleh sumberdaya manusia dan sumber pembiayaan yang memadai. Keberhasilan suatu daerah melakukan pembangunan akan tercapai apabila ketiga sumber daya tersebut dapat di padukan (terintegrasi) dengan baik. Pemanfaatan ketiga sumber tersebut secara bersamaan dan di barengi dengan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat akan memberikan ruang gerak bagi daerah untuk menata kehidupan dan membangun sumberdaya baik sumberdaya alam maupun sumber daya manusia yang lebih baik.

Kalimantan Barat merupakan yang sebgaiian besar daerahnya berbatasan dengan Negara tetangga Malaysia (serawak) memiliki berbagai potensi yang layak di kembangkan. Potensi-potensi tersebut belum semuanya dapat di olah. Potensi alam yang sudah di olah itupun masih terkesan sangat tradisional dan tidak di imbangi dengan perangkat (alat) yang memadai,. Sehingga potensi yang sudah di olah tersebut belum dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Kalimantan Barat yang terdiri dari 14 (empat belas) kabupaten/ kota memiliki berbagai potensi tersebut, misalnya seperti contoh Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten paling timur Klaimantan Barat memiliki potensi alam terutama perikanan. Permasalahan hang di hadapi nelayan tradisional di kecamatan Selimbau dari tahun ke tahun selalu sama. Pendapatan yang berfluktuatif, hal ini di sebabkan pemanfaatan dan pengelolaan ikan mulai dari penangkapan, proses penggunaan atau pemanfaatan hasil tangkapan hanya di olah oleh masyarakat nelayan maupun masyarakat yang memiliki keahlian lain seperti di jadikan : 1). Ikan asin, 2) ikan asap (salai), 3). Kerupuk.

Potensi perikanan yang berlimpah ini sangat di sayangkan bila tidak di maksimalkan oleh masyarakat dan pemerintah Daerah dengan baik. Dan yang tidak kalah pentingnya juga potensi alam tersebut merupakan potensi yang akan habis apabila masyarakat nelayan tidak menggunakan cara-cara yang baik dan benar dalam melakukan penangkapan. Oleh karena itu peran pemerintah daerah, serta organisasi-organisasi nelayan yang ada sudah harus memikirkan kelangsungan potensi alam terutama sector perikanan, agar nelayan tetap mendapatkan kesejahteraannya, dan tidak mengggurangi maupun merusak potensi yang sudah ada tersebut..

Peranan pemerintah dalam merencanakan berbagai kebutuhan masyarakat sangat di perlukan agar pembangunan sektor maupun regional dapat di lakukan secara berkesinambungan. Tujuan

pembangunan itu sendiri harus mencerminkan perubahan baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Perubahan social masyarakat yang di akibatkan dari perencanaan sampai implentasi perencanaan tersebut akan memberikan gambaran bagaimana daerah memandang pentingnya pembangunan berbasis keunggulan daerah. Perencanaan yang di buat berdasarkan kebutuhan masyarakat akan jauh lebih baik hasilnya di bandingkan dengan perencanaan yang di buat berdasarkan perkiraan. Oleh karena itu dalam merencanakan dan merumuskan suatu kebijakan harus melibatkan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan di lakukan, misalnya masyarakat, pemerintah (eksekutif, legislatif), swasta.

## II. RERANGKA TEORI

Perencanaan memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang akan di lakukan, dengan membuat suatu perencanaan yang baik, terarah, terukur akan memberikan gambaran yang jelas terhadap kebijakan yang akan di pilih. Perencanaan pembangunan yang berbasis produktivitas daerah akan memberikan keuntungan tersendiri bagi daerah dan masyarakat setempat. Perencanaan sektoral perlu di lakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang tersebut mengembangkan kemampuan dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan potensi yang menjadi unggulan daerah memerlukan visi, strategi. Dengan memiliki misi pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang akan di ambil, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dapat terarah, sesuai dengan apa yang di inginkan. Setelah itu pemerintah perlu merumuskan apa yang akan di lakukan, dengan demikian antara visi dan strategi harus di rumuskan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi yang di miliki oleh masing-masing daerah. Seperti dikatakan Putra (1992:27),” usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (sustainable development) memerlukan perubahan dalam kebijaksanaan dalam negeri tanpa mengorbankan kemampuan memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang”.

Pembangunan yang sedang di galakan pemerintah dewasa ini di setiap sector, baik sector perkebunan, pertambangan, jasa dan juga perikanan, sudah selayaknya di lakukan dengan memperhatikan kondisi wilayah maupun potensi yang di miliki oleh masing-masing wilayah (daerah). Pembangunan sektoral sangat penting di lakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, oleh karena itu sebelum melaksanakan suatu program pembangunan harus di rencanakan dengan baik dan memperhatikan kaidah serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Pembangunan yang berorientasi terhadap produktivitas daerah merupakan upaya yang seharusnya di lakukan agar dapat memberikan kontribusi dan motivasi tersendiri bagi masyarakat dalam keikut sertaannya melaksanakan program pemerintah. Arah kebijakan pemerintah dan strategi yang seharusnya di kembangkan, seperti yang di katakan Mawardi (2009:49) ”penetapan komoditas unggulan yang bernilai strategis dan prospektif untuk di kembangkan serta memiliki keunggulan komparatif, penetapan ini berdasarkan pertimbangan yang paling strategis dan bernilai tinggi, sehingga upaya pengembangan komoditas unggulan yang lebih berfokus”.

Pembangunan bersifat multi dimensi, dan tujuan pembangunan yang bervariasi. Upaya untuk mencapai tujuan harus terkait dengan yang lain misalnya ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Oleh sebab itu strategi yang harus di kembangkan dapat menunjukan keterkaitan ketiganya itu dapat menatasi masalah social dan juga tata-tatan social masyarakat. Pemanfaatan dan pelestarian potensi sektoral ini sebaiknya di dukung dengan kebijakan pemerintah.

Seerti di katakan oleh Meter and Horn ( 1998:77) mengatakan “*policy implementation encompasses those action by public and private individual and group that are directed at the achievement of goal and objectives set forth in prior policy decision*”, (implementasi kebijakan

mencakup tindakan yang di laksanakan oleh individu maupun kelompok pemerintah, swasta yang di arahkan pada pencapaian tujuan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan)". Selanjutnya Winarno (1989:66), "kebijaksanaan mungkin di implementasikan dengan efektif tetapi gagal memperoleh dampak social tidak di susun dengan baik".

Selanjutnya di katakan Dunn (1995:48), ada tiga pendekatan dalam menganalisa kebijaksanaan, adapun ketiga analisis tersebut adalah sebagai berikut : "1). Empiris, 2). Evaluatif, 3). Normatif". ketiga analisis ini masing masing memiliki tanggung jawab yang berbeda dan hasilnya kan memberikan suatu simpulan untuk mengambil atau membuat suatu kebijakan. Kebijakan yang di dasarkan atas kajian yang koheren akan memberikan dampak terhadap apa yang akan di laksanakan.

Memperhatikan apa yang di katakan Meter and Horn maupun Winarno tadi dapat di katakan bahwa perencanaan yang di lakukan pemerintah Daerah harus di di rencanakan dengan baik, mulai dari merumuskan apa yang akan di laksanakan, mengimplentasikan, serta mengevaluasinya harus di lakukan dengan benar serta memperhatikan kebutuhan masyarakat. Apabila sector perikanan di perhatikan dan di bangun di Kecamatan Selimbau maka sebutan sebagai kota ikan dahulunya akan dapat terulang kembali. Untuk itu hanya di perlukan komitmen pemerintah daerah, masyarakat serta pihak swasta.

Dengan melakukan pembangunan yang berencana di harapkan pembangunan yang berbasis keunggulan daerah ini dapat memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat serta dapat melestarikan kelangsungan sector perikanan, dengan demikian sector ini dapat di manfaatkan secara terus menerus. Masyarakat nelayan juga di untungkan dengan adanya kebijakan pemerintah yang melindungi sector ini dengan di kuatkan oleh peraturan daerah yang melarang masyarakat untuk melakukan penangkapan dengan menggunakan peralatan yang dapat merusak habitat maupun ekosistem perikanan.

Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dewasa ini juga jangan hanya melihat sektoral saja akan tetapi wilayah (regional) nya juga harus di perhatikan. Seperti di katakan Adisasmita (dalam Simandjorang 2010:36) "pendekatan sektoral saja tidak akan mampu melihat kemungkinan perubahan yang akan terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perencanaan sektoral tersebut. Sedangkan Tarigan (dalam Simandjorang 2010:36) mengatakan " pendekatan regional saja tidak cukup karane analisisnya bersifat makro wilayah, sehingga tidak cukup detail untuk membahas sector apalagi komoditi perkomoditi". Atas dasar itulah maka perencanaan pembangunan apapun haruslah melihat dan merupakan gabungan antara pembangunan sektoral dan regional.

### III. METODE PENELITIAN

Subyek penelitian ini adalah ketua DPRD Kapuas Hulu, yang sekaligus sebagai ketua HNSI (himpunan nelayan seluruh Indonesia Kapuas hulu), Ketua komisi A DPRD Kapuas Hulu, sekaligus merupakan ketua PNTI ( perhimpunan nelayan tradisional Indonesia Kapuas hulu), Camat Selimbau. Ketiganya ini merupakan informan kunci dalam mendapatkan informasi yang di perlukan dalam penelitian. Seperti yang di katakan Moeloeng (1988:90), informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun penentuan informan ini di lakukan dengan menggunakan metode Purposive Sampling.

Setelah data informasi yang di dapatkan melalui wawancara dan observasi, penulisan akan melakukan analisa dengan menggunakan penafsiran dan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana penulis akan mengguraikan hasil penelitian ini tidak menggunakan angka. Menurut Arikunto (1993:223), Observasi adalah suatu usaha untuk menggumpulkan data secara sistematis. sedangkan menurut schaltzman dan strauus dalam Moeloeng (1988:197), tujuan di lakukan penafsiran data adalah deskriptif semata-mata.

#### IV. PENYAJIAN DATA

Selimbau merupakan kota kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, di mana masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai nelayan baik, nelayan aktif maupun pasip. Nelayan aktif yang di maksudkan di disini adalah masyarakat yang menetap di daerah-daerah yang di sebut danau. Masyarakat yang berada di danau memiliki pekerjaan tetapnya adalah sebagai nelayan. Nelayan sejak jaman dahulu apabila di bina dan berikan pelatihan bagaimana menangkap ikan dan menggunakan hasil tangkapan (produksinya), tentu hasil yang di dapatkan para nelayan ini akan semakin baik dan tingkat kesejahteraannya akan meningkat.

Pemanfaatan hasil alam yang di lakukan oleh setiap masyarakat di manapun berada tidak menyalahi aturan apabila di lakukan dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Begitu juga dengan pemanfaatan potensi alam terutama perikanan. Masyarakat kecamatan Selimbau yang terdiri dari 13 (tiga belas desa) desa mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Adapun desa-desa tersebut adalah sebagai berikut desa gudang hulu, desa titian kuala, desa gudang hilir, desa dalam, desa nibung, desa piasak, desa mawan, desa vega, desa sekulat, desa lobuyan, engkregas, desa benuis, desa gerayau, dari ke 13 Desa tersebut hanya dua desa yang tidak memiliki potensi perikanan.

Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu di beberapa Kecamatan pernah melakukan pelestarian ikan, akan tetapi hanya di beberapa daerah saja. Akan tetapi kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan dan mengolah hasil ikan masih belum di lakukan. Oleh karena itu hasil tangkapan ikan yang di lakukan nelayan masih hanya sebatas di dimanfaatkan untuk membuat ikan asin, ikan asap (salai), serta kerupuk. Apabila di lihat dari manfaat sector perikanan bagi pemerintah Daerah kabupaten Kapuas Hulu dan juga masyarakat di Kecamatan Selimbau sangat besar apabila sector ini di kelola dengan baik.

Seperti apa yang di katakan ketua komisi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang juga ketua himpunan nelayan Kabupaten Kapuas hulu, untuk program tahun 2012, HNSI akan melakukan pembinaan dan memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan, yang ada di Kecamatan Selimbau. Karena menurutnya nelayan merupakan ujung tombak bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan dari sector perikanan. Oleh karena itu bantuan berupa peralatan sangat di perlukan. Akan tetapi menurutnya bukan hanya peralatan yang di butuhkan oleh nelayan. Nelayan juga memerlukan tempat pemasaran yang tetap.

Dengan adanya penampung tetap maka harga dapat terjaga dengan baik. Kehidupan nelayan pada saat ini memang tidak semuanya sulit, bagi masyarakat nelayan yang tidak hanya berharap dari hasil tangkapan mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Nelayan ini memiliki peliharaan ikan yang biasanya ikan Toman, sehingga mereka memiliki harapan kedepan apabila hasil tangkapan menurun.

Oleh karena itu menurut ketua HNSI mereka akan memberikan bantuan untuk nelayan, agar nelayan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan hasil observasi penulis, sebenarnya nelayan yang ada di Kecamatan Selimbau tidaklah dapat di katagorikan Miskin, hal ini dapat terlihat dari apa yang mereka miliki, rata-rata nelayan memiliki Speed, memiliki keramba ikan, dan yang tidak kalahnya lagi menurut observasi penulis rata-rata masyarakat yang berada di Kecamatan Selimbau yang menunaikan ibadah haji di dominasi oleh mereka yang berprofesi sebagai nelayan.

Selain itu di katakan ketua HNSI mereka akan selalu mendampingi nelayan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat nelayan, dengan berbagai cara. Untuk itu ia berharap nelayan harus selalu menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Misalnya di desa nelayan telah di berikan bantuan perumahan untuk nelayan. Kemudian HNSI akan membantu nelayan menyampaikan aspirasi ke pemerintah daerah terkait dengan apa yang mereka butuhkan, misalnya dengan membentuk kelompok nelayan sehingga keberadaan nelayan dapat di koordinir apa yang di perlukan. Kelompok nelayan ini juga akan memberikan contoh bagi pertumbuhan pembangunan sektoral. Dengan adanya kelompok

nelayan yang di berikan bantuan maka nelayan dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Pembangunan daerah berdasarkan produktivitas akan memberikan berbagai keuntungan tersendiri bagi daerah, seperti misalnya daerah tersebut akan menjadi sumber bagi daerah lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak di miliki oleh daerah tersebut, selain itu pembangunan berdasarkan produktivitas akan memberikan pelestarian terhadap potensi yang di miliki oleh daerah tersebut. Akan tetapi konsekwensi dari perencanaan seperti ini memerlukan komitmen yang tinggi dari pemerintah Daerah Kabupaten terhadap berbagai potensi yang di miliki masing-masing-daerah.

Potensi perikanan yang di miliki kapanpun dapat habis apabila tidak di manfaatkan di kelola dengan baik, untuk menjaga potensi tersebut agar dapat di nikmati secara turun temurun seharusnya di buat peraturan daerah yang mengatur hukum, atau sanksi bagi yang melanggar ketentuan, misalnya menangkap dengan menggunakan alat-alat yang di larang. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang melarang masyarakat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, serta menggunakan jaring yang halus merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga agar sector perikanan ini dapat terjaga dan tidak habis, sehingga kelangsungan hidup masyarakat dan potensi perikanan tersebut dapat di nikmati secara turun temurun. Akan tetapi kebijakan yang di tuangkan kedalam Perda belum pernah di terbitkan, masyarakat hanya masih berpegang dengan kesepakatan yang telah mereka buat, sehingga bagi siapapun yang melanggar dapat di kenakan sanksi. Kekayaan alam yang seperti perikanan di kecamatan Selimbau sudah sangat terkenal dari sejak jaman dulu, sehingga Selimbau terkenal dengan sebutan “Kota Ikan”. Di lihat dari sejarah pemanfaatan sector tersebut, ternyata sector perikanan belum memberikan kontribusi yang memadai. Kebijakan pemerintah Daerah menggalakan dan melestarikan sector perikanan ini seharusnya dapat di lihat dari komitmen pemerintah daerah dalam membina masyarakat nelayan dari yang tradisional menjadi lebih baik (modern), akan tetapi seperti halnya tersebut masih kurang di lakukan oleh pemerintah terutama instansi terkait

Untuk membangun masyarakat terutama masyarakat nelayan agar memiliki keterampilan dan memanfaatkan sector perikanan seperti di katakan oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kapuas Hulu memerlukan waktu, biaya, serta perencanaan yang integral. di lanjutkan olehnya perencanaan tersebut harus datangnya dari bawah, artinya masyarakat berkomitmen untuk menjaga sector tersebut dengan baik, kemudian pemerintah Kecamatan harus selalu memberikan informasi ke pemerintah Kabupaten secara rutin dan terperinci apa yang akan di lakukan oleh Kecamatan. Pembangunan sector perikanan di karenakan potensi daerah Selimbau yang merupakan penghasil ikan di Kapuas Hulu akan memberikan keuntungan bagi Pemerinah Daerah untuk melakukan perencanaan, pembinaan sehingga Kecamatan Selimbau dapat menjadikan contoh bagi daerah lain yang memiliki potensi sama dengan Kecamatan Selimbau, selain itu pemerintah dapat memberikan kesempatan pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Dengan demikian di lanjutkan oleh ketua komisi A ini sebenarnya pemerintah Kabupaten selalu memberikan dorongan, rangsangan dan perhatian kepada daerah yang memiliki potensi untuk di kembangkan. Pendanaan untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut di katakannya tidak terlalu sulit, apabila masyarakat dan pihak Kecamatan dapat memberikan gambaran yang jelas apa yang akan mereka programkan, sehingga Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kajian apakah sector tersebut benar-benar merupakan potensi yang dapat di kembangkan atau tidak.

Pemerintah Kabupaten sendiri seperti di katakan oleh ketua komisi A DPRD Kapuas Hulu pernah melakukan penyebaran bibit ikan Arwana guna mengantisipasi punahnya ikan langka tersebut, dan bukan hanya arwana yang pernah di lepaskan di daerah danau, pernah juga di lakukan oleh pemerintah kabupaten Kapuas hulu melepaskan benih ikan jelawat di beberapa tempat untuk mencegah kepunahan potensi perikanan di Kecamatan Selimbau. Akan tetapi untuk pengolahan seperti di katakan oleh ketua

komisi A DPRD Kapuas hulu belum pernah di lakukan. Misalnya ikan nantinya tidak hanya di manfaatkan seperti sekarang akan tetapi pengolahan ikan itu harus di fikirkan oleh pemerintah daerah agar sector perikanan terutama Kecamatan Selimbau dapat menghasilkan produk tertentu dengan bahan dasarnya ikan.

Bagi masyarakat di Selimbau kehidupan dan menjalani pekerjaan sebagai nelayan yang sudah di lakukan secara turun temurun bukanlah hal yang sulit, kebiasaan ini sudah mendarah daging di setiap masyarakat, beberapa tahun ini banyak orang tua yang anaknya ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sudah mulai terlihat di beberapa daerah Danau. Hal ini memberikan gambaran sesungguhnya pekerjaan (profesi) nelayan ini bukanlah tidak memberikan penghasilan yang cukup besar.

Seperti di katakan oleh Camat Selimbau, kehidupan masyarakat Nelayan sudah jauh lebih baik, hal ini dapat di lihat, banyak anak-anak yang sudah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bagi pemerintah kecamatan selalu memberikan tanggapan yang positif terkait dengan keluhan yang nelayan berikan terhadap apa yang mereka hadapi. Permasalahan yang di hadapi oleh nelayan tidaklah sulit untuk di pecahkan, karena biasanya hanya bagaimana memberikan kenyamanan dan kelancaran sungai sebagai prasarana untuk berpergian.

Kewajiban pemerintah kecamatan hanya mengusulkan ke pemerintah Daerah baik melalui perwakilan di DPRD maupun langsung ke bagian Kesejahteraan Rakyat. Masalah lain yang sangat klasik di hadapi tentunya juga ada seperti rendahnya harga ikan pada waktu tertentu, ini biasanya terjadi pada saat kemarau. Dan apabila hal ini yang terjadi seperti di katakan oleh Camat Selimbau pemerintah tidak dapat berbuat banyak karena itu sudah terkait dengan pasar. Akan tetapi secara keseluruhan menurutnya pemerintah bersedia menjembatani apa yang di butuhkan nelayan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Bantuan nelayan seperti yang di katakan Camat Selimbau berupa bantuan uang, akan tetapi bantuan tersebut tidak secara berkesinambungan sehingga sulit untuk mengatakan dengan bantuan keuangan akan memecahkan permasalahan kesejahteraan nelayan. Di lanjutkan olehnya yang sangat di butuhkan nelayan adalah peralatan penangkapan dan penyuluhan serta organisasi yang dapat menampung hasil tangkapan, sehingga dapat memberikan harga yang lebih baik.

Bagi Camat Selimbau pekerjaan masyarakat yang mayoritas nelayan, tentu pemerintah Kecamatan juga memikirkan bagaimana upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, misalnya memberikan kesempatan kepada nelayan untuk menyampaikan pendapat, saran yang akan di lanjutkan oleh Camat ke pemerintah Kabupaten.. menurut Camat kurangnya penyuluhan dan pembinaan kepada nelayan membuat pola pekerjaan nelayan di Kecamatan Selimbau masih terkesan di lakukan secara tradisional. Karena di lakukan secara tradisional maka hasil yang mereka dapatkan juga masih sangat sedikit, di banding dengan nelayan yang mendapatkan pembinaan, dan perhatian oleh pemerintah.

Dari apa yang di katakan ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Ketua Komisi A, serta Camat Selimbau dan berdasarkan hasil observasi penulis, pembangunan sektoral perikanan ini tidak dapat di lakukan dengan instan dengan kebijakan yang di buat jangka menengah saja, kebijakan jangka menengah hanya dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat ini akan tetapi belum tentu permasalahan yang akan datang. Kebijakan pemerintah daerah dengan menabur Biit ikan di beberapa daerah tertentu bila tidak di lanjutkan atau di lakukan secara terus menerus maka sama halnya merupakan program yang tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat nelayan.

Selain itu pembinaan terhadap nelayan harus di lakukan secara terus menerus, kegiatan pembinaan ini merupakan upaya pemerintah menjaga sector perikanan dari kerusakan dan kepunahan. Pembinaan ini mulai dari pembinaan untuk menjaga nelayan untuk tidak menggunakan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan serta kepunahan, serta pembinaan pemanfaatan ikan sebagai hasil produksi dari

yang tradisional menjadi lebih baik. Pembinaan ini memerlukan kontinuitas serta biaya, akan tetapi untuk mendukung pembangunan yang berbasis produktivitas unggulan daerah wajib dilakukan.

Kurangnya pembinaan dan dukungan secara nyata yang di berikan pemerintah Daerah Kabupaten kapuas Hulu kepada nelayan terkait dengan pembinaan, penyuluhan berdampak pada pendapatan nelayan dari tahun ke tahun tidak terlalu memberikan perubahan terhadap kondisi masyarakat nelayan. Bantuan yang pernah di berikan seperti modal tidak memberikan solusi bagi nelayan untuk merubah taraf hidup mereka. Yang harus di berikan oleh pemerintah bagi masyarakat nelayan adalah bagaimana nelayan dapat memproduksi hasil ikan yang mereka dapatkan tidak hanya seperti sekarang. Akan tetapi produksi perikanan dapat bervariasi seperti ikan dapat di jadikan Abon ikan dan lain sebagainya.

Pembangunan sektoral yang berbasis produktivitas unggulan daerah memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah mampu mengelola dan memberdayakan potensi yang ada di daerahnya. Pembangunan sektoral ini terutama terkait dengan potensi yang di miliki daerah akan memberikan kemudahan bagi daerah untuk melaksanakan pembinaan dan menggorganisir berbagai potensi yang di miliki masing-masing daerah. Dengan demikian akan terlihat potensi alam dan potensi sumber daya manusia yang ada berpotensi maka pemerintah daerah juga akan meresa dampaknya dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah.

## **V. DISKUSI**

Dari hasil wawancara dan observasi penulis terhadap pembangunan berbasis keunggulan daerah terutama sector perikanan yang ada di Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu, maka ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi peneliti yang mungkin dapat di jadikan referensi untuk di tindak lanjuti oleh pemerintah Daerah Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. perlu di terbitkan PERDA tentang pemeliharaan sector perikanan, terutama dalam hal pelarangan penangkapan ikan yang menggunakan alat-alat yang berbahaya.
2. Perlu di lakukan pembinaan, penyuluhan kepada nelayan tentang pemeliharaan, pengolahan, dan produksinya, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan
3. Secara rutin melakukan dialog dengan nelayan apa yang menjadi keluhan dan apa yang di inginkan untuk mendorong nelayan menjadi lebih baik dan modern.

## **VI. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

Pembangunan daerah berbasis produktivitas unggulan daerah perlu di lakukan, pembangunan ini bertujuan untuk memberikan cirri khas tersendiri daerah satu dengan daerah yang lainnya. Pembangunan berbasis produktivitas unggulan Daerah memerlukan koitmen, kerjasama, masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga, mengelola, memanfaatkan, sedangkan pemerintah wajib melakukan penataan, pembinaan. Sehingga dengan adanya daerah unggulan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah. Begitu juga dengan masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu kebijakan pemerintah, terutama bagaimana pembinaan dan program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sangat di butuhkan. Minimnya pembinaan, penyuluhan yang di berikan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, membuat masyarakat nelayan sulit untuk mengembangkan kemampuan mereka dari tradisional kearah yang modern.

Tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan saat ini di bandingkan dengan beberapa tahun lalu sudah cukup baik, pemenuhan kebutuhan hidup bagi keluarga juga sudah cukup baik, hanya di perlukan pembinaan dari pemerintah untuk merubah pola produksi perikanan dari tradisional menjadi yang modern, sehingga hasil perikanan tidak hanya di jadikan ikan asin, ikan asap (salai), juga

kerupuk, pembinaan dan penyuluhan juga terkait dengan cara-cara pengangkapan yang akan merugikan nelayan itu sendiri di kemudian hari. Dengan memiliki komitmen untuk membuat masyarakat lebih baik di perlukan perencanaan yang di buat pemerintah Daerah, sehingga Daerah yang menghasilkan produktivitas unggulan menjadi lebih banyak dan memiliki kualitas serta akan menjadikan cirri khas daerah itu sendiri.

## REFERENSI

- Arikunto,S. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit, PT.Rineka Cipta.
- Dunn, W. N. (1995). *Analisa Kebijakan Publik, Kerangka Analisa Dan Prosedur Perumusan Masalah*, penerbit, PT.Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.
- Moeloeng, L. J. (1988). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Meter, D. S & Horn. (1998). *The Policy Implementation Procces : A Conceptual Framework, Administration and society*.
- Mawardi, M.I. (2009). *Membangun Daerah Yang Berkemajuan,Berkeadilan dan Berkelanjutan*, Penerbit IPB, Bogor.
- Putra, W. (1992). *Faktor-Faktor Kelembagaan Dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan*, Suara Almamater Untan, Pontianak.
- Simandjorang, W.E. (2010). *Pembangunan Regional*, Penerbit Universitas Indonesia.
- Winarno, B. (1989). *Teori Kebijakan Publik, Penerbit Pengembangan Pusat Fasilitas Bersama Antar Universitas ( Bank Dunia XVII) PAU*.Yogyakarta, Studi Sosial Universitas Gajah Mada.